



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 04 Maret 2017

Halaman: 2

**DATANGI PANWAS, KAWAL LAPORAN
FPDI Duga Ada Mobilisasi PNS**



KR-Ardhi Wahdan

Massa FPDI mendatangi Sekretariat Panwas Kota Yogya.

YOGYA (KR) - Massa Forum Pengawal Demokrasi Indonesia (FPDI) yang sebelumnya mendatangi Balaikota Yogya, kini beralih ke Sekretariat Panwas Kota Yogya di Jalan Suryopranoto Pakualaman, Jumat (3/3). Mereka menduga ada mobilisasi PNS di lingkungan Pemkot Yogya dalam ajang Pilwali.

"Selama belum ada penetapan calon terpilih, berarti tahapan Pilwali masih berjalan. Dugaan kami ada mobilisasi, dan semoga ini turut diusut oleh Panwas. Yang jelas, kami akan terus mengawal proses laporan terhadap enam orang pegawai Pemkot yang terbukti mengenakan kaos milik pasangan nomor dua," papar Ketua DPC PDIP Kota Yogya Danang Rudiymoko saat mendampingi massa FPDI, kemarin.

Oleh karena itu, pihaknya berharap Panwas mendalami keterlibatan PNS lain yang diduga terlibat mendukung pasangan calon. Apalagi, pihaknya juga mendapat laporan jika saksi kunci mendapat aksi teror hingga membuat tidak nyaman bekerja di lingkungan Pemkot.

"Saksi sudah mulai takut untuk mengungkap semuanya. Kami akan memberikan dukungan dan perlindungan saksi. Bahkan jika perlu, akan kami ajukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar bersama-sama kepolisian memberikan perlindungan," tandasnya.

Komisiner Panwas Kota Yogya Divisi Penindakan Pilkeska Hiranurpika mengaku, dari enam orang terlapor, lima orang di antaranya sudah memberikan keterangan. Sedang satu orang lagi baru sempat hadir ke Panwas Kota Yogya pada Sabtu (4/3) hari ini.

Setelah seluruh terlapor berhasil diperiksa, namun keputusan adanya pelanggaran juga belum dapat dilakukan. Hal ini karena pihaknya masih perlu meminta keterangan dari pihak lain yang terkait untuk menafsirkan tentang aparat sipil negara serta batasan kampanye. Pasalnya, dugaan ketidaknetralan PNS tersebut terjadi di luar Kota Yogya serta tidak pada masa kampanye.

"Sesuai mekanisme, kami diberikan waktu lima hari dari laporan yang masuk untuk memutuskan perkara. Tapi jika diperlukan keterangan tambahan, maka diperbolehkan menambah hari sesuai yang dibutuhkan," tandasnya.

Di samping itu, pihaknya juga memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam mengungkap laporan dugaan PNS tidak netral. Pihak yang hendak melakukan intervensi pun harus berhadapan dengan tiga institusi, yakni Panwas, Kepolisian dan Kejaksaan. (Dhi)-m

Instansi	Sifat	Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
3. BKPP			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005